

## BAB III

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja di PT Indo Acidatama tbk dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja di PT Indo Acidatama tbk sudah berjalan dengan cukup baik, hal tersebut diketahui melalui pengaturan-peraturan terkait yang telah dipatuhi oleh PT Indo Acidatama tbk seperti perusahaan memberikan alat pelindung diri (APD) kepada pekerja, perusahaan telah memberikan penyuluhan tentang pentingnya sistem K3 kepada pekerja, perusahaan juga memberikan *check up* / pemeriksaan kesehatan bagi pekerja dan semua pekerja sudah mendapatkan jaminan sosial dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan. PT Indo Acidatama tbk juga mendapatkan penghargaan sertifikasi kategori emas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di mana penghargaan tersebut diberikan karena PT Indo Acidatama tbk telah menerapkan sistem K3 secara konsisten di lingkungan perusahaan, namun pada PT Indo Acidatama tbk masih terjadi kecelakaan kerja, yang disebabkan karena ketidaktaatan pekerja, pekerja yang enggan menggunakan alat pelindung diri (APD) saat melakukan pekerjaannya.

## **B. SARAN**

Meskipun pelaksanaan K3 di PT Indo Acidatama tbk sudah berjalan dengan cukup baik namun masih perlu penyempurnaan bahwa pengurus perusahaan juga harus memberikan penyuluhan mengenai penggunaan alat pelindung diri (APD) secara berkala tidak hanya pada awal pekerja masuk bekerja. Pengurus perusahaan juga harus sering mengecek APD pekerja apakah APD pekerja masih layak pakai atau tidak agar keselamatan dan kesehatan kerja lebih terjamin selain itu pengawasan kepada pekerja juga harus lebih ditingkatkan agar pekerja lebih tertib terhadap peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku :**

- Abdul Rachmad Budiono, 2009, *Hukum Perburuhan*, PT Indeks, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Danang Sunyoto, 2013, *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pengusaha, (Cetakan 1)*, Cempaka Yustisia, Yogyakarta.
- Djoko Triyono, 2004, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi, (Cetakan 1)*, Mandar Maju, Bandung.
- Eko Wahyudi, dkk. 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No.13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hari Supriyanto V., 2013, *Kesejahteraan Pekerja Dalam Hubungan Industrial di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Imam Soepomo , 1987, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, (Cetakan ke 6)*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Lalu Husni, 2016, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, (edisi revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Soeprihanto J., 2002, *Manajemen Personalia*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Yayasan Kesejahteraan Keluarga dan Pekerja, 2000, *Pedoman Teknis Pengoprasian dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Supervisor*, Jakarta.
- Zaenal Asikin, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie, 2008, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Hubungan Kerja, (edisi ke-2)*, Jakarta Rajawali Pers, Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4279. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5063. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 5256. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.PER.01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.

**Website :**

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/Program-Jaminan-Pensiun.html>, diakses tanggal 25 Maret 2019.